ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Yoshua Cristiandy *¹
Dastin Darmawan ²
Rizky Dharma Putra ³

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji
*e-mail : yoshuacristiandy@gmail.com

Abstrak

Sebagai badan hukum, perseroan terbatas memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap berbagai pihak. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan direksi, dan dewan komisaris merupakan salah satu organ penting perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, tulisan ini mengkaji pertanggungjawaban direksi dalam perkara kepailitan perseroan terbatas (PT). Sejumlah ketentuan terdahulu telah diperbarui oleh undang-undang ini, termasuk pertanggungjawaban direksi dalam mengelola perseroan. Tulisan ini mengkaji sejauh mana direksi yang terbukti lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kepailitan perseroan. Studi ini meneliti sejumlah kasus kebangkrutan dan putusan pengadilan terkait dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode analisis kualitatif. Menurut temuan studi, para direktur kini lebih bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan operasional dan keuangan perusahaan sebagai akibat dari perubahan hukum. Hasil ini memberikan informasi baru yang penting kepada para pemangku kepentingan— pemegang saham, direktur, dan regulator tentang betapa pentingnya tata kelola perusahaan yang baik untuk menghindari kebangkrutan dan melindungi kepentingan semua pihak.

Kata kunci: tanggung jawab direksi, kepailitan, Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja.

Abstract

A limited liability company is a legal entity, so it is an entity that has the authority to carry out legal actions against various parties. PT has important organs such as the General Meeting of Shareholders (GMS), directors and board of commissioners. This research analyzes the responsibility of directors in bankruptcy cases of Limited Liability Companies (PT) based on Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. This law updates several aspects of previous regulations, including the responsibilities of directors in managing the company. This study examines the extent to which directors can be held personally responsible for company bankruptcy if they are proven to have committed errors or negligence in carrying out their duties. This research uses a normative juridical approach with qualitative analysis methods, reviewing various bankruptcy cases and relevant court decisions. The research results show that with changes in the law, there is increased accountability of directors in maintaining the company's financial and operational stability. These findings provide important insights for stakeholders, including shareholders, directors and regulators, about the importance of good corporate governance to prevent bankruptcy and protect the interests of all parties involved.

Keyword : Obligations of directors, bankruptcy, Job Creation Law.

PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan peristiwa yang signifikan dan dapat berdampak pada berbagai pihak, termasuk kreditor, pemegang saham, karyawan, dan anggota keluarga lainnya. Fokus utama hukum Indonesia adalah tanggung jawab manajemen direktur, terutama dalam hal kepailitan suatu perusahaan. Peraturan yang berkaitan dengan tugas direktur dalam Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu dari sekian banyak perubahan penting terhadap berbagai unsur hukum yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Karena perseroan terbatas merupakan badan hukum, maka perseroan terbatas memiliki kewenangan untuk melakukan

tindakan hukum terhadap berbagai pihak. Salah satunya adalah berkembang menjadi badan hukum yang mandiri dan mampu melakukan tindakan hukum atau mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Oleh karena itu, PT sering melakukan pinjam meminjam sebagai bagian dari kegiatan usahanya untuk memenuhi kebutuhan modalnya. Pinjaman usaha merupakan pengaturan yang melibatkan utang dan piutang PT yang harus dibayar kembali tepat waktu.

Perseroan terbatas memiliki modal dasar yang terbagi atas saham dan harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang.¹² Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UUP, tiga organ utama perseroan terbatas adalah direksi, dewan komisaris, dan rapat umum pemegang saham (RUPS). Salah satu dari tiga badan perseroan terbatas yang memiliki kekuasaan penuh atas perusahaan adalah direksi. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 UUP yang menyatakan bahwa "Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta memegang kekuasaan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".

Setiap anggota Direksi harus memiliki niat yang tulus dan rasa akuntabilitas yang kuat ketika menjalankan tugasnya demi kepentingan terbaik perusahaan. Seorang direktur dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atau kekayaan pribadinya dijadikan jaminan untuk melunasi utang-utang perseroan dalam keadaan pailit, apabila terdapat indikasi bahwa dalam menjalankan tugasnya ia menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi dan menimbulkan kerugian finansial, kerugian yang menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit³.

UU Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi di Indonesia. Penegasan kembali dan perubahan tugas direktur dalam manajemen perusahaan merupakan salah satu fitur utamanya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perubahan aturan ini memengaruhi akuntabilitas direktur, terutama ketika perusahaan bangkrut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pertanggungjawaban direksi dalam perkara kepailitan PT dengan menggunakan ketentuan baru dalam UU Cipta Kerja. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kepailitan perusahaan apabila terbukti bahwa mereka lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Untuk menghindari kepailitan dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, analisis ini juga akan mempertimbangkan konsekuensi hukum dan prosedur tata kelola perusahaan yang baik.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami peran dan tanggung jawab direksi dalam menjaga stabilitas keuangan dan operasional perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan tata kelola perusahaan dan mencegah terjadinya kepailitan yang merugikan banyak pihak.

METODE

Dalam menyusun sebuah kajian ilmiah, harus digunakan prosedur tertentu. Menurut Jonaedi Efendi, pendekatan adalah melakukan kajian secara langsung dengan strategi tertentu. Dengan demikian, metode akan lebih mudah diterapkan dalam kajian untuk memberikan batasan-batasan agar tidak terjadi pemikiran yang keliru dan tidak terkendali.⁴ Pendekatan merupakan suatu strategi penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan yang diteliti atau cara untuk memahami

¹ Yetty Kumalasari Dewi, *Hukum Persekutuan Di Indonesia : Teori Dan Kasus* (Jakarta: Kencana, 2022) hal 2.

³ Munir Faudy, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) hal 13.

⁴ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Cetakan II. (Depok: Prenadamedia Group, 2016) hal 45.

masalah yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha ilmiah yang melibatkan penerapan teknik, metode, dan gagasan tertentu untuk menganalisis dan menyelidiki berbagai peristiwa hukum. Keberadaan penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kekuatan pendorong di balik solusi teoritis dan praktis terhadap berbagai permasalahan hukum yang semakin kompleks akibat kemajuan zaman⁵. Pendekatan hukum normatif digunakan dalam karya ini. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang kompeten mencakup unsur-unsur sejarah hukum dan hukum perbandingan yang relevan serta telaah asas-asas hukum, mekanisme hukum, dan keselarasan baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian ia menggarisbawahi bahwa "hukum" dalam konteks ini mengacu pada pendekatan hukum positif yang mencakup hukum tertulis yang dibuat oleh orang yang berwenang, dan bahwa penelitian hukum ini juga mencakup penelusuran dan penilaian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal juga dengan UU Cipta Kerja bertujuan untuk mendorong lebih banyak investasi dan meningkatkan iklim ekonomi Indonesia. Pengaturan tugas direksi dalam Perseroan Terbatas (PT), khususnya dalam situasi pailit, menjadi komponen penting dalam undang-undang ini.⁶ UU Cipta Kerja membuat penyesuaian penting terhadap cara direktur dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebangkrutan suatu perusahaan. UU Cipta Kerja menekankan pentingnya direktur untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan tekun, penuh tanggung jawab, dan beritikad baik. Hal ini berarti menjalankan bisnis secara profesional dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang relevan. Direktur bertanggung jawab untuk membuat pilihan operasional dan strategis yang dapat berdampak pada kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi.

Menurut UU Cipta Kerja, direktur memiliki dua jenis tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab fidusia, yang mengharuskan mereka bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang sahamnya. Mereka harus menahan diri dari menggunakan jabatan mereka untuk keuntungan pribadi dan mencegah konflik kepentingan. Kemudian ada tanggung jawab pribadi, yang berarti bahwa direktur dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya jika terbukti bahwa mereka lalai atau melakukan kesalahan yang menyebabkan kebangkrutan.

UU Cipta Kerja menetapkan standar yang tepat untuk kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh direktur. Misalnya, jika seorang direktur tidak melaksanakan tugasnya sesuai standar profesional yang diharapkan, mereka dianggap lalai. Ini mencakup manajemen risiko yang buruk, pengawasan operasional yang tidak memadai, atau pilihan yang ceroboh. Jika kedua direktur dengan sengaja bertindak di luar kewenangan mereka atau dengan cara yang merugikan perusahaan, mereka dapat dianggap telah melakukan pelanggaran⁷. Pembuatan laporan keuangan palsu, pengabaian utang dan tanggung jawab pajak perusahaan, serta investasi gegabah yang dilakukan tanpa analisis risiko memadai adalah beberapa contoh kecerobohan dan kesalahan yang dapat membuat direktur bertanggung jawab.

Pemeriksaan kasus kepailitan pasca disahkannya UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa direksi kini dituntut untuk memiliki standar akuntabilitas yang lebih tinggi. Berdasarkan sejumlah putusan pengadilan, direksi yang terbukti lalai atau terbukti bersalah mengelola perusahaan harus

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I., vol. 4 (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁶ Asikin Zainal dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hal 84.

⁷ Monica Agustina Gloria, "Kepailitan Perseroan Perorangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja," *Panorama Hukum* 1, no. 1 (2020) hal 27.

bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita. Misalnya, pengadilan memutuskan bahwa direksi PT XYZ yang mengajukan pailit lalai mengelola keuangan perusahaan secara memadai dan mengabaikan indikasi awal masalah keuangan. Pada akhirnya, kebangkrutan terjadi akibat direksi tidak mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan, seperti merestrukturisasi utang atau memangkas biaya operasional. Direksi PT XYZ diwajibkan oleh UU Cipta Kerja untuk mengganti kerugian yang dialami pemegang saham dan kreditor⁸.

Bisnis diharapkan dapat meningkatkan pengendalian dan pengawasan internal mereka sebagai akibat dari penerapan UU Cipta Kerja. Para direktur perlu lebih berhati-hati saat membuat pilihan operasional dan strategis. Di antara konsekuensi hukum dan tindakan yang dapat diambil oleh bisnis adalah: Peningkatan Transparansi, direksi harus memastikan bahwa semua informasi yang relevan tentang kinerja keuangan dan operasional perusahaan dilaporkan dengan akurat dan tepat waktu.

- a) Manajemen Risiko yang Efektif, perusahaan harus mengimplementasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum menjadi krisis.
- b) Kepatuhan terhadap Regulasi, direksi harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengurangi risiko hukum dan operasional

KESIMPULAN

Beberapa simpulan penting dapat ditarik dari kajian kewajiban direksi dalam perkara kepailitan Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Di antaranya sebagai berikut: Undang-Undang Cipta Kerja memberikan penekanan kuat untuk memberikan tanggung jawab pengelolaan yang lebih besar kepada direksi. Khususnya dalam keadaan yang dapat mengakibatkan kepailitan, direksi harus melaksanakan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian, akuntabilitas penuh, dan itikad baik. Pengaturan ini memberikan pemahaman yang lebih tepat kepada direksi tentang kesalahan dan kecerobohan yang dapat mengakibatkan kesalahan pribadi. UU Cipta Kerja mendorong pelaku usaha untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan internal dengan membuat direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami apabila terbukti lalai atau melakukan kesalahan yang berujung pada kebangkrutan perusahaan. Dengan tanggung jawab dan tata kelola yang lebih baik, UU ini berupaya melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pihak terkait lainnya. Hal ini meliputi pengelolaan risiko yang efisien, keterbukaan dalam pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan. Untuk mencegah terjadinya kebangkrutan yang dapat merugikan banyak pihak, direksi diharapkan dapat mengambil keputusan secara bijaksana. Berdasarkan analisis kasus kebangkrutan, penerapan UU Cipta Kerja berdampak signifikan terhadap akuntabilitas direksi. Banyak putusan pengadilan yang menunjukkan bahwa direksi yang lalai atau melakukan kesalahan harus dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, yang meningkatkan standar tata kelola perusahaan dan berfungsi sebagai pencegah. Dengan mempertimbangkan semua hal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menawarkan kerangka perundang-undangan yang lebih kuat untuk menjamin direksi menjalankan tanggung jawabnya dengan lebih bertanggung jawab. Perusahaan harus mampu menurunkan risiko kebangkrutan, membangun lingkungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan dengan tata kelola dan pengawasan internal yang lebih baik.

⁸ Saliman Abdul, *Hukum Bisnis Perusahaan, Teori Dan Contoh Kasus* (Jakarta: Renada Media Group, 2005) hal 34.

SARAN

Berdasarkan analisis pertanggungjawaban direksi terhadap kepailitan Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, berikut adalah beberapa saran yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan mengurangi risiko kepailitan:

1. Pelatihan rutin tentang manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik, dan perubahan perundang-undangan terkini sangat penting bagi para direktur. Sebagai hasilnya, mereka akan mampu membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan, dorong para direktur untuk memperoleh sertifikat profesional di bidang keuangan dan manajemen.
2. Untuk melihat masalah tersebut sejak dini dan mengambil tindakan sebelum menjadi bencana, bisnis perlu meningkatkan departemen audit internal mereka. Audit internal yang efisien dapat menjamin kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan dan membantu mengidentifikasi anomali.
3. Untuk mengantisipasi risiko apa pun terhadap kesehatan operasional dan keuangan perusahaan, identifikasi risiko secara berkala. Untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi, buat rencana mitigasi risiko menyeluruh yang mencakup pengurangan biaya operasional, diversifikasi investasi, dan asuransi bisnis.
4. Kinerja operasional dan keuangan perusahaan, serta langkah-langkah apa pun yang diambil untuk menyelesaikan kemungkinan masalah, harus dilaporkan kepada pemegang saham dan regulator secara berkala oleh dewan direksi.
5. Direksi harus memastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk yang terkait dengan kepailitan dan tata kelola perusahaan. Mereka harus proaktif dalam memahami dan menerapkan perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
6. Jalin komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, kreditor, karyawan, dan regulator, untuk mendapatkan masukan dan dukungan dalam pengelolaan perusahaan.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan perusahaan dapat memperkuat tata kelola dan pengawasan internal, mengurangi risiko kepailitan, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Hal ini akan membantu menciptakan iklim usaha yang lebih stabil dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Saliman. *Hukum Bisnis Perusahaan, Teori Dan Contoh Kasus*. Jakarta: Renada Media Group, 2005.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Cetakan II. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Faudy, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- . *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek Edisi Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Gloria, Monica Agustina. "Kepailitan Perseroan Perorangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Panorama Hukum* 1, no. 1 (2020).
- Kumalasari Dewi, Yetty. *Hukum Persekutuan Di Indonesia : Teori Dan Kasus*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan I. Vol. 4. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Suhartana, Asikin Zainal dan Wira Pria. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja